



# APTB Sarat Permainan Kotor

## Oknum di Masa Lalu Mainkan Kebijakan

**PROGRAM** Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway dinilai hasil permainan kotor oknum Pemprov DKI dengan pengusaha di masa lalu. Oknum tersebut menyalahgunakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Dulu ada oknum pemerintah yang main trayek dengan Organda. Saya tidak tahu bagaimana APTB itu tercipta, APTB itu total kebijakan yang salah," ujar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kemarin (7/5), di Balaikota DKI Jakarta.

Ahok mengatakan, konsep trayek APTB yang beroperasi hingga kota peyangga salah total. Padahal layanan Bus Transjakarta yang seharusnya merambah hingga perbatasan kota untuk mengangkut penumpang. "Kami siap mengalokasikan dana untuk membangun jalur Bus Transjakarta di kota peyangga. Mereka butuh berapa? Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun, kami siap berikan. Bupati, walikota, semua teman baik. Mereka pasti mau Transjakarta masuk wilayahnya. Jadi bukan APTB yang masuk Jakarta," sergah dia.

Bahkan Ahok menyayangkan sikap Organda DKI yang memaksakan ego pengurus tanpa memperhatikan operator dan penumpang. "Organda itu cuma sok saja. Tugas Organda itu apa? Membantu transportasi Jakarta, mensejahterakan sopir dan pemilik bus. Bukan cuma jadi pengurus yang asal teriak-teriak. Selama puluhan tahun transportasi DKI tidak beres, Organda kerjanya apa?" tegas dia.

Terkait kisruh penggunaan jalur Transjakarta oleh operator APTB, Pemprov DKI Jakarta memberikan dua opsi yakni APTB dapat masuk jalur busway dan mengangkut penumpang dari jalur busway, tetapi tidak boleh memungut biaya. Kemudian, Pemprov DKI juga tidak membayar rupiah per kilomernya. Sedangkan opsi kedua,

APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan jalur terakhir koridor busway.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi DKI Jakarta Safruhan Sinungan, mengatakan kedua opsi sama-sama mematikan pihak operator APTB. Pasalnya, opsi pertama dampak kerugian bagi pihak operator APTB akan begitu besar. Pihaknya tak memungkiri pihaknya juga mencari untung dalam layanan APTB.

Dia mengatakan, opsi pertama sama saja menyuruh swasta mensubsidi masyarakat. "Dua opsi ini buah simalakama, pertama bapak mati, kedua ibu mati. Dua-duanya tidak untung. Tapi tidak ada pilihan lain selain memilih opsi kedua," ujar Safruhan.

Pihaknya dan operator APTB mengklaim bahwa selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penentuan tarif rupiah per kilometer, oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Dikatakan dia, pihaknya membantah bahwa pihaknya sudah melakukan kesepakatan soal ketentuan tarif rupiah per kilometer. "Kami sampaikan hingga Selasa kemarin, operator APTB belum pernah diajak diskusi tarif. Jadi tidak benar ada kesepakatan dalam perhitungan tarif antara Organda, Transjakarta dan Dishub," ungkap Safruhan.

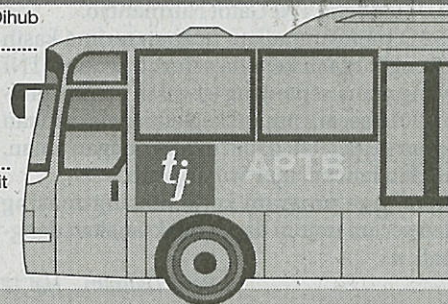
Menurut dia, para operator APTB selama ini sudah membantu menyupport Pemprov DKI dalam layanan transportasi bagi masyarakat di kota peyangga yang hendak menuju ibu kota.

Menurut dia, ini bukan masalah berapa harga yang diminta pihak operator. Sehingga diharapkan Gubernur Ahok mau duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Apalagi operator APTB mengeluarkan sekitar Rp 2 miliar untuk membeli satu unit bus. Saat ini, sedikitnya 187 unit bus APTB sudah beroperasi di bawah beberapa operator.

Sementara itu, Management Mayasari Arifin Ashari, salah satu operator dari APTB menginginkan, APTB tetap beroperasi seperti saat ini. Pemilihan opsi kedua dapat menurunkan jumlah penumpang hingga 50 persen. Pasalnya penumpang tidak turun sampai tujuan. "Kita ambil resiko terkecil. Jadi kalau tidak ada pilihan kita pilih opsi kedua," ujar Arifin Ashari kepada INDOPOS. (wok/nas)

## Konflik Tarif Per Kilometer APTB

- Pembahasan bersama antara Dishub DKI dengan Organda DKI
- Organda DKI tolak harga yang ditawarkan Pemprov DKI
  - Sebesar Rp 14.000-15.000 per kilometer
  - Organda minta Rp 18.000 per kilometer
- Armada APTB Sebanyak 78 unit
  - Trayek Blok M-Cileungsi
  - Cikarang-Kali Deres
  - Grogol-Cibinong
  - Tangerang-Pulogadung
  - Bekasi-Tanah Abang



ANGGA GUMELAR/INDOPOS